



LPJP APBD 2011

# Fraksi GOHAN Soroti Lima Temuan BPK



BUPATI RIA NORSAN MENERIMA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DI DPRD DALAM PEMBAHASAN RAPERDA LPJP APBD 2011.

FOTO:PISA

## Mempawah, BERKAT.

Fraksi Golkar, Hati Nurani Rakyat, dan Amanat Nasional (GOHAN) DPRD Kabupaten Pontianak, pagi kemarin, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2011, melalui sidang paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua, H Rusli Abdullah SE, dan dihadiri Bupati Pontianak, Drs H Ria Norsan MM MH.

Dalam Pandangan Umum yang dibacakan juru bicaranya, Basti Mulyadi, GOHAN menyoroti lima temuan BPK RI hasil dari pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2011.

Adapun lima temuan BPK RI yang menjadi sorotan Fraksi GOHAN, yakni penyelesaian hibah aset kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang berlarut-larut, terhadap kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru pegawai sipil

daerah sebesar Rp 1.048.465.410.

Selanjutnya, penagihan tunggakan penjualan angsuran sebesar Rp 126.201.500, yang tidak optimal, realisasi belanja senilai Rp 3.337.539.008, belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap, serta terakhir perjanjian tukar menukar (ruislag) aset antara Pemkab Pontianak dengan TNI AD yang terbengkalai. "Kami mohon kelima temuan itu bisa dijelaskan," katanya.

Selain lima temuan di atas, GOHAN juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam komponen pendapatan daerah yang disampaikan bupati dalam LPJP-nya, dimana terdapat fakta dan angka yang menunjukkan peningkatan PAD dari Rp 20,84 milyar yang dianggarkan menjadi Rp 22,23 milyar yang terealisasi atau mencapai 106,61 persen.

Fraksi GOHAN juga menilai angka peningkatan ini masih menggunakan angka yang konservatif. Selain itu, acuan Pemkab Pontianak dalam menentukan peningkatan PAD belum berbasis database yang kukuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Belum adanya data riset potensi daerah (Risпода) sebagai acuan dalam menyusun proyeksi dan prediksi PAD, menyebabkan tidak adanya indikator yang jelas dan terukur dalam menilai optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Pontianak," ucapnya. (psa)